

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2022)
- Aris Prio Agus Santoso (2021), *Pengantar Hukum Investasi di Indonesia*. (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2021)
- Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal Kebijakan Pembatasan Modal Asing : Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan* (Bandung : Keni Media, 2019)
- G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah : Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah* (Jakarta : Rineka Cipta, 1985)
- Harjono, Dhaniswara K, *Hukum Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal* (Jakarta : Raja Grafindo, 2007)
- Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri* (Jakarta : Pradnya Paramita,1972)
- Mohammad Koesnardi, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Medan Pratama, 1988)
- M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2004)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2007)
- Ronny Hanitjio S., *Metodologi Penelitian dan Yurimetri* (Semarang : Ghalia, 1990)
- R.T. Sutantya,et.al. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori, dan Praktik)* (Depok : Rajagrafindo Persada, 2020)
- Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2021)
- Tim Sosialisasi BKPM *Buku Panduan Menuju Perizinan Berbasis OSS* (Litbang BKPM : 2019)

World Investment Report UNCTAD (2019) diakses secara daring dalam [unctad.org/system/files/official-document/WIR2019\\_CH4.pdf](http://unctad.org/system/files/official-document/WIR2019_CH4.pdf)

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika ; Jakarta, 2018)

## B. Media

Antara Yogya, *Ini Tiga KEK Baru di Indonesia*. [online] diakses dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Diakses dari <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Gresik>

Bank Indonesia [online] Indonesia-Singapura Agreement for Special Economic Zone dari <https://www.bi.go.id/en/iru/highlightnews/Pages/Indonesia%20%20Singapore%20Agreement.aspx>

BPS Kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Ayat*. (Gresik : BPS Kabupaten Gresik)

BPS Kabupaten Gresik, Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Agustus 2022. Diakses dari <https://gresikkab.bps.go.id/pressrelease/2023/09/20/220/keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-gresik-agustus-2022.html>

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. *Peta Sebaran KEK* [online] Diakses dari <https://kek.go.id/peta-sebaran-kek>

Kementerian PUPR, RDTR Sebagai Alat Utama Wujudkan Tertib Tata Ruang [online] diakses dari <https://pu.go.id/berita/rdtr-sebagai-alat-utama-wujudkan-tertib-tata-ruang-pada-11-januari-2024>

Radargresik (2023) KEK Gresik Ditarget Serap Investasi 105 Triliun Hingga Tahun 2025. Diakses dari <https://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/831734491/kek-gresik-ditarget-erapinvestasi-105-triliun-hingga-tahun-2025>

Titra Citradi, Benarkah Urus Izin Pendirian Usaha di RI Ribet? Cek Faktanya! Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191029142549-4-111006/benarkah-urus-izin-pendirian-usaha-di-ri-ribet-cek-faktanya-pada-6-februari-2024>

Trias, *Perbedaan PT PMA dan PT PMDN, Apa Saja* [online] diakses dari <https://legalist.id/perbedaan-pt-pma-dan-pt-pmdn-apa-saja/>

Yusuf Assidiq (Republika Online) “Sembilan Tenant Siap Tempati Kawasan Industri JIPE Gresik” diakses dari [https://ekonomi.republika.co.id/berita/p5bjf2399/sembilan-tenant-siap-tempati-kawasan industri-jiipe-gresik](https://ekonomi.republika.co.id/berita/p5bjf2399/sembilan-tenant-siap-tempati-kawasan-industri-jiipe-gresik) pada 29 Januari 2024

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### D. Jurnal

- Acep Rohendi, “Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) Dalam Pembaharuan Hukum Investasi Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (August 19, 2014) : 392 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2750216>
- Erni dan Febri Jaya, “Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha” *Jurnal Wajah Hukum* Volume 6(2), Oktober 2022
- Indah Sari. “Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 10 No.2, Maret 2020
- Moch. Iqbal Mastut Tahma, “Analisis Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” *Jurnal Politeknik Imigrasi*
- Rio Christiawan, “Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 50 No. 1 Januari 2021
- Siti Rifqa Raihani, “Tinjauan Yuridis Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” (Solo : Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2012)

## Lampiran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM

Jalan Dr. Arbanus Suryo  
Kampus Universitas Diponegoro  
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024) 75915201 Faks (024) 75915208  
Laman: www.fh.undp.ac.id, Pos-el: fh@fh.undp.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Tim Pemeriksa Kemiripan Tulisan Ilmiah telah memeriksa unggahan file atas nama:

Nama : Adila Haira  
NIM : 11000120130557  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Mekanisme Penanaman  
Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Tgl Pemeriksaan : 22 Februari 2024

Menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi Turnitin terhadap tulisan ilmiah dengan judul di atas menghasilkan kemiripan/similarity sebesar 4% dengan sumber-sumber online lainnya. Oleh karena itu, tulisan ilmiah tersebut di atas dinyatakan LOLOS cek turnitin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi  
Perpustakaan  
  
Fahimah, S.Sos.  
NIP. 197508132001122001

## **Jawaban Email dari Bapak Tovany Akbar**

### **Pertanyaan :**

1. Bagaimana implementasi/pelaksanaan atau penerapan hukum penanaman modal di JIPE Gresik?
2. Bagaimana mekanisme menanam modal di JIPE Gresik?
3. Bagaimana implementasi keistimewaan pada penanam modal di JIPE Gresik?
4. Sudahkah ada laba/keuntungan yang didapat JIPE Gresik? Kalau sudah ada, sejak tahun berapa?
5. Bagaimana cara mengoptimalkan keberfungsian JIPE Gresik supaya berhasil sesuai target?

### **Jawaban :**

Kawasan *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIPE) telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik. PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) merupakan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik.

1. Pelaksanaan penanaman modal di JIPE (KEK Gresik) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk dapat melakukan kegiatan usaha di JIPE (KEK Gresik).
2. Mekanisme penanaman modal di JIPE (KEK Gresik) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kawasan ekonomi khusus sepanjang belum diubah/dicabut serta transaksi bisnis antar perusahaan (*Business to Business*).
3. Fasilitas dan kemudahan di KEK yang dapat diperoleh Badan Usaha maupun Pelaku Usaha KEK Gresik diantaranya perpajakan, kepabeanan, dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha termasuk pelayanan terpadu satu pintu di kantor Administrator KEK, Infrastruktur, KEK sebagai PSN dsb.
4. PT BKMS sebagai pengelola Kawasan Industri JIPE telah berdiri sejak 27 Juni 2012, memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) pada tahun 2014, pertama kali melakukan kegiatan komersial pada Januari 2016, dan pada 28 Juni 2021 ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Sejak berdirinya hingga saat ini sudah ada laba / keuntungan yang di dapat oleh PT BKMS.

5. Agar keberfungsian JIPE (KEK Gresik) mencapai target, diperlukan optimalisasi dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kab. Gresik.

**Narahubung:**

Permit & License PT BKMS

Tofani Akbar (+62 895-3363-84862)